



Available online at **FACTUM**; Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah
website: <https://ejournal.upi.edu/index.php/Factum>
FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah, 14(1), 77-88



RESEARCH ARTICLE

Romansa Kedekatan Sukarno dan Kim Il Sung Pada Periode Demokrasi Terpimpin (1959-1965)

Amanda Lathifah Laksmiana Putri

Departemen Sejarah, Fakultas Ilmu Pengetahuan Budaya, Universitas Indonesia
Correspondence Author: amanda.lathifah@ui.ac.id

To cite this article: Putri, A, L, L. (2022). Romansa kedekatan sukarno dan kim il sung pada periode demokrasi terpimpin (1959-1965). **FACTUM: Jurnal Sejarah dan Pendidikan Sejarah**, 14(1), 77-88. <https://doi.org/10.17509/factum.v14i1.80981>.

Abstract

This article explores the history of friendship and strong diplomatic relations between two prominent world leaders: President Sukarno of Indonesia and President Kim Il Sung of North Korea. Their close relationship reached its peak during Sukarno's presidency, particularly during Indonesia's Guided Democracy era. Both leaders made reciprocal visits to each other's countries, further solidifying bilateral ties. This closeness is reflected in cultural symbols such as the North Korean song "Bung Karno" and the naming of the orchid species *Kimilsungia*. The article employs the historical method, which includes the stages of heuristics, verification, interpretation, and historiography. It draws on both primary and secondary sources, including photographic archives from the University of Indonesia, newspapers, books, theses, journals, and scholarly works related to the topic. This research aims to contribute to the historiography of diplomatic history between Indonesia and North Korea, a subject that remains relatively underexplored.

Abstrak

Artikel ini akan menjelaskan sejarah persahabatan dan hubungan diplomatik yang kuat antara dua tokoh pemimpin dunia, yakni Presiden Sukarno dari Indonesia dan Presiden Kim Il Sung dari Korea Utara. Keduanya memiliki beberapa kesamaan, seperti prinsip ideologi yang dianut serta pandangan yang serupa tentang bahasa nasional masing-masing sebagai bahasa persatuan. Mereka berdua juga sama-sama pernah dipenjara semasa memperjuangkan nilai-nilai yang mereka percaya. Kedekatan mereka berdua mencapai masa puncaknya ketika masa pemerintahan Sukarno, terutama pada periode Demokrasi Terpimpin di Indonesia, ketika mereka berdua saling bertukar kunjungan ke negara masing-masing. Tentu kedekatan ini memperkuat hubungan diplomatik antara negara Indonesia dan Korea Utara. Wujud kedekatan ini juga dapat dilihat dalam lagu Sukarno-Kim Il Sung dan spesies bunga anggrek *Kimilsungia*. Kedekatan kedua negara ini kemudian memudar semenjak pemerintahan Sukarno di Indonesia digantikan oleh Soeharto pada periode Orde Baru. Artikel ini disusun menggunakan metode ilmu sejarah yang terdiri dari tahapan heuristik, verifikasi, interpretasi, dan historiografi, serta menggunakan sumber-sumber baik primer dan sekunder berupa arsip Universitas Indonesia, surat kabar, buku, jurnal, serta karya ilmiah tentang topik terkait.

Article Info

Article History:

Received 27 Feb 2025

Revised 1 April 2025

Accepted 25 April 2025

Available online 25 April 2025

Keyword:

Kim Il Sung; North Korea; Sukarno.

Kata Kunci:

Kim Il Sung; korea Utara; Sukarno.

PENDAHULUAN

Saat ini, negara Korea Utara seringkali dianggap sebagai negara yang terpencil, penuh propaganda, dan seram. Reputasi tersebut seringkali digaungkan oleh negara Barat, yang melihat bahwa Korea Utara selalu mengisolasi dirinya dari perkembangan luar dan dipenuhi oleh peraturan dalam kehidupan sehari-hari masyarakatnya. Akan tetapi, rupanya Korea Utara berusaha menghapus imaji tersebut. Akhir-akhir ini, Presiden Korea Utara yakni Kim Jong Un nampak berupaya untuk menyaingi popularitas Korea Selatan khususnya dalam bidang hiburan, yang ditandai dengan peluncuran lagu bertajuk “Friendly Father”, yang liriknya menggambarkan pemujaan terhadap sosok Kim Jong Un sendiri. Lagu ini kemudian menjadi viral di internet dan banyak diparodikan oleh warganet.

Rupanya, tidak hanya saat ini Korea Utara membuka dirinya pada perkembangan politik dan hiburan di dunia internasional. Dalam perjalanan sejarah Indonesia, khususnya saat pemerintahan Presiden Sukarno khususnya pada periode Demokrasi Terpimpin, terlihat sebuah kedekatan yang mesra antara negara Indonesia dan Korea Utara. Masa Demokrasi Terpimpin di Indonesia (1959-1965) merupakan periode yang ditandai dengan konsolidasi kekuasaan Presiden Sukarno serta kebijakan politik luar negeri yang aktif dan dinamis. Salah satu aspek penting dari kebijakan luar negeri Sukarno adalah pendekatan terhadap negara-negara sosialis, termasuk Republik Demokratik Korea (Korea Utara) yang dipimpin oleh Kim Il Sung saat itu. Kedekatan diplomasi antara Sukarno dan Kim Il Sung pada periode ini memainkan peran signifikan dalam membentuk hubungan bilateral antara Indonesia dan Korea Utara, yang didasarkan pada prinsip-prinsip antiimperialisme dan solidaritas dunia ketiga. Kedekatan ini tidak lepas dari persahabatan erat sosok dua presiden negara tersebut, yakni Sukarno dan Kim Il Sung.

Meskipun 42% orang Indonesia memiliki pandangan positif terhadap Korea Utara (tertinggi kedua di dunia setelah Ghana), menurut jajak pendapat BBC tahun 2013, saat ini hanya sedikit orang Indonesia yang mengingat atau menaruh perhatian besar pada hubungan Indonesia-Korea Utara. Hal ini tidak terlalu mengejutkan, mengingat bahwa hubungan antara kedua negara dibayangi oleh semakin pentingnya Korea Selatan, baik secara global maupun di Indonesia (Sulaiman, 2015).

Indonesia tetap menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang sebagian besar penduduknya masih berpikir positif tentang Korea Utara. Fenomena ini sebagian dapat dijelaskan dengan melihat pembentukan, penguatan, dan puncak hubungan Indonesia-Korea Utara, yang terjadi selama periode penuh gejolak di Indonesia pada tahun 1960-an. Pada periode ini, politik Perang Dingin, terutama perpecahan Sino-Soviet yang menyebabkan kebijakan agresif Tiongkok di Asia Timur dan Tenggara, bertemu dengan tujuan kebijakan luar negeri Indonesia dan Korea Utara, yang mengarah pada pendalaman hubungan di antara ketiga negara ini (Sulaiman, 2015).

Topik tentang hubungan diplomasi Indonesia-Korea Utara ataupun biografi dari Sukarno dan Kim Il Sung sebenarnya sudah banyak ditulis, baik oleh periset dari kedua negara tersebut maupun negara lainnya. Rachmawati Sukarnoputri, salah satu anak Sukarno dari istrinya Fatmawati menulis buku berjudul *President Sukarno and President Kim Il Sung* yang terbit tahun 2012. Buku ini sebenarnya bersifat lebih ke memoar dan catatan perjalanan dibanding buku akademik, dan dimulai membahas tentang pengantar latar belakang historis dan beberapa kesamaan antara Sukarno dan Kim Il Sung. Narasi kemudian berlanjut pada catatan seputar kunjungan Sukarno ke Korea Utara dan Kim Il Sung ke Indonesia. Selain tulisan, buku ini juga dilengkapi dengan berbagai foto-foto di berbagai peristiwa, utamanya ketika kedua presiden ini saling bertukar kunjungan ke negara masing-masing.

Terkait pentingnya kebijakan hubungan diplomasi luar negeri bagi Korea Utara diulas dalam artikel *Southeast Asia in Pyongyang's Foreign Policy* di jurnal *Asian Perspective*, Volume 1 No. 2 (1977), hal. 162-182 oleh Byung Chul Koh. Artikel jurnal ini mencoba mendeskripsikan secara runut mengenai hubungan diplomasi luar negeri antara Korea Utara dengan negara-negara di kawasan Asia Tenggara. Indonesia sendiri khususnya menjadi salah satu negara pertama yang menjadi prioritas Korea Utara, dengan dibukanya hubungan diplomatik pada tahun 1964. Kunjungan Kim Il Sung ke Indonesia merupakan sebuah pencapaian baru bagi sejarah hubungan luar negeri dari Korea Utara saat itu, karena ini adalah kali pertama Kim Il Sung melakukan perjalanan jauh ke negara yang bukan berpaham komunis. Kim Il Sung juga dituliskan mengagumi keberanian Sukarno dalam bertindak dan memberikan sikap dalam hubungan luar negeri Indonesia, khususnya ketika Sukarno memutuskan untuk keluar dari PBB.

Karya berikutnya adalah artikel *Not So Strange Bedfellows: Indonesia-North Korea Relationship in the 1960s* di jurnal *동아연구*, Volume 25 No. 2 (2016), hal. 321-352 oleh Yohanes Sulaiman. Tulisan Yohanes menuliskan sejarah hubungan diplomasi antara Indonesia dan Korea Utara. Indonesia tetap menjadi salah satu dari sedikit negara di dunia yang sebagian besar penduduknya masih berpikiran positif terhadap Korea Utara meskipun hubungan antara Indonesia dan Korea Selatan sedang berkembang. Fenomena ini sebagian dapat dijelaskan dengan melihat pembentukan, penguatan, dan puncak hubungan Indonesia-Korea Utara, yang terjadi pada masa penuh gejolak di Indonesia pada tahun 1960an. Kedua negara dipersatukan salah satunya karena isu Federasi Malaya, yang dari sudut pandang Beijing dan Jakarta, merupakan bagian dari pengepungan imperialis terhadap Tiongkok dan Indonesia dengan membangun rantai rezim anti-komunis di Asia Tenggara.

Hendra Manurung juga menulis artikel *Indonesia-North Korea Diplomatic Relations: Effort to Pursue National Interest and Create Regional Peace* dalam jurnal *Politica*, Vol. 11, No. 2 (2020), hal. 223-244. Artikel jurnal ini menjelaskan secara analitis bagaimana implementasi kebijakan luar negeri Indonesia terhadap Korea Utara selama 59 tahun sejak 17 Juni 1961. Indonesia sendiri merupakan sahabat diplomatis Korea Selatan dan dulunya Korea Utara juga memiliki sejarah bersama Presiden pertama Indonesia, Sukarno. Sejak tahun 1961, Indonesia dan Korea Utara memiliki sejarah yang luar biasa yang berakar pada Gerakan Non-Blok. Presiden Sukarno menjamu Kim Il-sung pada kunjungan tersebut pada tahun 1960an, dengan sebagian kunjungannya termasuk tur ke Kebun Raya Bogor.

Karya-karya di atas belum mengeksplorasi secara spesifik persahabatan antara Presiden Sukarno dan Kim Il Sung. Padahal, persahabatan ini nantinya berefek kepada kedekatan diplomasi antara Indonesia dan Korea Utara. Maka tujuan dari penulisan artikel ini adalah untuk mengetahui bagaimana persahabatan Sukarno dan Kim Il Sung dapat berdampak pada kedekatan hubungan diplomasi antara kedua negara, yakni Indonesia dan Korea Utara pada periode Demokrasi Terpimpin di Indonesia

Artikel ini menggunakan konsep diplomasi untuk menganalisis kedekatan antara Sukarno dan Kim Il Sung. Menurut Berridge (2010), diplomasi pada dasarnya adalah kegiatan politik dengan sumber daya yang baik dan terampil, Tujuan utamanya adalah untuk memungkinkan negara mengamankan tujuan kebijakan luar negeri mereka tanpa menggunakan kekerasan, propaganda, atau hukum. Oleh karena itu, diplomasi terdiri dari komunikasi antar pejabat yang dirancang untuk mempromosikan kebijakan luar negeri baik melalui kesepakatan formal maupun penyesuaian secara diam-diam.

Berridge juga berpendapat bahwa representasi merupakan hal yang penting dalam jalannya suatu diplomasi. Representasi, yang sering diabaikan atau secara naif diminimalkan sebagai fungsi diplomasi, hampir sama dengan propaganda. Pada dasarnya melibatkan kegiatan menghibur, memberikan ceramah publik, tampil di acara televisi dan radio, dan menghadiri acara-acara seremonial kenegaraan. Pada prinsipnya, hal ini dapat dilakukan oleh para menteri dan pejabat pemerintah, tetapi mereka tidak dapat berada di mana-mana dan memiliki pekerjaan penting di rumah. Akibatnya, tugas ini terutama diberikan kepada para duta besar. Namun demikian, pada saat-saat tertentu, tokoh-tokoh senior pemerintah harus pergi ke luar negeri untuk tugas perwakilan seperti untuk menghadiri suatu acara khusus, atau hanya untuk kunjungan kehormatan, mereka juga sangat bergantung pada dukungan dari kedutaan besar setempat. Hal ini dapat dilihat dalam kunjungan Sukarno dan Kim Il Sung ke masing-masing negara. Dalam studi kasus artikel jurnal ini, akan mencoba menjelaskan para pemimpin negara Indonesia dan Korea Utara yakni Sukarno dan Kim Il Sung yang mampu membuahkan hasil berupa kedekatan diplomasi yang erat antara kedua negara.

METODE

Peneliti menggunakan metode penelitian sejarah yang terdiri dari empat langkah yaitu heuristik, kritik, interpretasi, dan historiografi dalam menulis artikel ini. Sumber-sumber yang digunakan berupa sumber primer seperti surat kabar terkait serta arsip dari Universitas Indonesia, yang dilengkapi juga oleh sumber sekunder seperti karya-karya ilmiah yang sudah ada. Setiap sumber yang digunakan telah melewati tahap kritik baik kritik internal maupun eksternal. Langkah ini dilakukan untuk memverifikasi kredibilitas dari berbagai sumber tersebut. Setelah itu, dilakukan interpretasi dan analisis terhadap sumber-sumber yang telah terkumpul, dengan tujuan

mendapatkan fakta-fakta yang kemudian diolah menjadi narasi sejarah. Tentu penulisan dalam artikel jurnal ini dilengkapi dengan pendekatan menggunakan konsep diplomasi.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Hubungan Indonesia-Korea Utara masa Demokrasi Terpimpin

Indonesia pernah mengalami suatu periode pemerintahan yang sering disebut sebagai periode Demokrasi Terpimpin. Periode ini mulanya disebabkan oleh banyaknya kekurangan pada sistem demokrasi parlementer di Indonesia pada tahun 1950 melalui Undang-Undang Dasar Sementara 1950, dengan dua kelemahan pokok. Kelemahan pertama adalah fragmentasi parlemen Indonesia, dimana tidak ada partai mayoritas yang menguasai lebih dari separuh jumlah kursi DPR. Akibatnya terjadi proses “coalition building” yang mudah pecah karena perbedaan suatu kebijaksanaan. Ini terjadi pada masa revolusi kemerdekaan maupun pada masa DPR sementara, 1950. Hanya setelah terbentuknya DPR hasil pemilu 1955 dapat dibentuk koalisi besar yang terdiri dari PNI, Masyumi dan Nahdlatul Ulama. Akan tetapi karena mudahnya koalisi kabinet pecah, maka umur kabinet juga tidak terlalu lama, antara enam bulan hingga dua tahun. Kelemahan lainnya, yakni Presiden Sukarno kehilangan kesabaran terhadap kabinet-kabinet yang tidak fokus lagi pada pembangunan nasional, Presiden Sukarno menunjuk dirinya sebagai formatur dan membentuk kabinet karya yang dipimpin Ir. Djuanda. Situasi politik yang bisa dikatakan kacau saat itu terjadi, hampir di setiap daerah timbul pemberontakan akibat ketidakpuasan kepada pemerintahan pusat. Konflik kekuasaan antara partai-partai politik di parlemen yang saling menjatuhkan satu sama lain (Indrajat, 2016).

Keadaan ini membuat Presiden Sukarno mengkritik demokrasi parlementer dan sistem multi partai dengan pidato-pidatonya. Situasi politik yang makin kritis dalam masa tersebut

seperti pergolakan dalam badan konstituante dan parlemen, membuka kesempatan bagi Sukarno untuk ikut menyelesaikan masalah yang dihadapi, dengan mengambil tindakan dikeluarkannya Dekrit Presiden 5 Juli 1959 yang berisi sebagai berikut:

1. Pembubaran Konstituante
2. Berlakunya Kembali UUD 1945
3. Tidak berlakunya UUDS 1950
4. Pembentukan MPRS dan DPAS

Konsep demokrasi terpimpin Sukarno menurut Takashi Shiraishi dipengaruhi oleh pemikiran yang berkembang pada nasionalis generasi pertama seperti yang diwakili Soetatmo, Tjipto, dan Ki Hajar Dewantara. Pengaruh Tjipto terhadap Sukarno adalah perlunya national spirit menjadi national will yang akhirnya akan mewujudkan dalam bentuk aksi nasional. Sedangkan pengaruh Soetatmo di dapatnya dari konsep demokrasi dan leiderschap (kepemimpinan) dari Ki Hadjar Dewantara, yang sangat dipengaruhi oleh visi Soetatmo mengenai negara kekeluargaan di bawah kendali Bapak/yang bijaksana/pandhita ratu (Indrajat, 2016).

Dampak dari Dekrit Presiden 1959 ini adalah terjadi pembubaran DPR dan MPR dari hasil pemilihan umum tahun 1955, digantikan dengan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong yang anggotanya diangkat oleh Presiden Sukarno. Demikian juga pimpinan MPR Sementara dan DPR Gotong Royong diangkat sebagai menteri koordinator dan menteri dalam kabinet. Sedangkan usaha Presiden Sukarno untuk menyederhanakan sistem partai politik dengan mengurangi jumlah partai politik melalui Perpres No. 7/1959 yang membatalkan maklumat pemerintah tentang pembentukan partai politik tanggal 3 November 1945, diganti dengan partai-partai politik harus memenuhi syarat-syarat yang harus dipenuhi agar diakui pemerintah. Hanya 10 partai yang memenuhi syarat tersebut yaitu PKI, PNI, NU, Partai Katolik, Partindo, Parkindo, Partai Murba, PSII Arudji, IPKI, Partai Islam Perti, sedangkan partai lain tidak

memenuhi syarat, termasuk PSI dan Masyumi yang dituduh terlibat pemberontakan PRRI/PERMESTA. Untuk mawadahi 10 partai tersebut maka dibentuklah Front Nasional, yang berdasarkan NASAKOM (Nasionalis, Agama dan Komunis) ditambah golongan fungsional termasuk militer (Indrajat, 2016).

Dalam aspek politik luar negeri, periode Demokrasi Terpimpin banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang cukup membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan politiknya. Masalah perdebatan dan pembebasan Irian Barat adalah salah satu peristiwa politik luar negeri yang mewarnai hubungan internasional pada masa Demokrasi Terpimpin. Hubungan Indonesia dengan beberapa negara seperti Belanda, Uni Soviet, Amerika, RRT, Malaysia dan sebagainya juga mewarnai politik luar negeri Indonesia. Pada masa Demokrasi Terpimpin juga banyak diwarnai peristiwa-peristiwa internasional yang melibatkan Indonesia sebagai bagian dari masyarakat internasional (Ariyantoro & Liana, 2018).

Menurut Mohammad Hatta, politik luar negeri Indonesia harus bebas, yang mengandung pengertian tentang kesanggupan bangsa Indonesia untuk menentukan jalan sendiri dan tidak terpengaruh oleh kepentingan politik pihak manapun, sementara kata aktif menjelaskan tentang keyakinan bangsa Indonesia menuju pada terciptanya perdamaian dunia dan bersahabat dengan segala bangsa dan negara. Politik bebas aktif Indonesia membawa kebijakan luar negeri Indonesia untuk berhubungan dengan berbagai negara terlepas dari ideologi dan arah politiknya. Kebijakan tersebut tetap bertahan hingga Demokrasi Terpimpin.

Namun pada masa ini, kebijakan “bebas aktif” Indonesia terdapat interpretasi lain sehingga terjadi perubahan pola yang perlahan bergeser ke arah ‘Kiri’. Hal ini dapat terlihat dari Dekrit Presiden pada tanggal 5 Juli 1959 ketika Sukarno berpidato di Istana Negara yang kemudian dikenal sebagai ‘Manifesto Politik’

yang ditetapkan sebagai GBHN (Garis Besar Haluan Negara) setelah mendapat masukan dari DPA (Amrullah, 2021).

Semenjak ditetapkan berlakunya kembali Undang-Undang Dasar 1945 dengan Dekrit presiden 5 Juli 1959, terdapat serangkaian dokumen yang mendasari politik luar negeri Republik Indonesia yakni Undang Undang Dasar 1945, Amanat Presiden/Panglima Tertinggi Angkatan Perang pada tanggal 17 Agustus 1959 yang berjudul “Penemuan Kembali Revolusi Kita”, Amanat Presiden tanggal 17 Agustus 1960 yang terkenal dengan nama “Jalannya Revolusi Kita” yang terkenal sebagai “Manifesto Politik Republik Indonesia” dan Pidato Presiden tanggal 30 September 1960 di muka Sidang Majelis Umum PBB yang berjudul “To Build the World A New” (Ariyantoro & Liana, 2018).

Arah kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin adalah jelas ingin mewujudkan kemerdekaan penuh nasionalnya demi menjalankan revolusinya yang berdasarkan akan sikap yang bebas dan aktif dalam mewujudkan perdamaian dunia. Dalam upaya-upaya menghimpun kawan yang dikonfrontasikan dalam menghadapi imperialisme dan kolonialisme. Kebijakan politik luar negeri Indonesia pada masa Demokrasi Terpimpin juga terarah ke tujuan-tujuan dan pandangan-pandangan Presiden Sukarno dalam menciptakan kekuatan-kekuatan diplomasi, militer dan keamanan negara demi melawan imperialisme dan kolonialisme (Ariyantoro & Liana, 2018).

Salah satu negara yang mempunyai hubungan erat dengan Indonesia adalah Korea Utara. Indonesia sudah memiliki hubungan diplomatik resmi terlebih dahulu dengan Korea Utara dibandingkan dengan saudaranya di Selatan (Amrullah, 2021). Hubungan tersebut masih bertahan hingga saat ini dan sudah terjalin sejak April 1964 dibandingkan dengan Korea Selatan yang baru resmi pada September 1973 (Koh, 1977). Hubungan Indonesia dengan Korea Utara sudah lebih dulu terbentuk sejak

Mei tahun 1957 melalui perjanjian dagang yang ditandatangani oleh Dewan Ekonomi Indonesia dengan *Korea Committee for the Promotion on International Trade*. Pada Juni 1961, Indonesia dan Korea Utara membuka hubungan bilateral dengan pembukaan kantor urusan kekonsuleran, namun baru terealisasi pada 30 Desember 1961 yang kemudian ditingkatkan menjadi setingkat Konsulat Jenderal pada Februari 1964 dengan Konjen pertamanya yaitu Sufri Jusuf. Hubungan itu ditingkatkan menjadi hubungan resmi dengan diresmikannya Kedutaan Besar Indonesia di Pyongyang pada 16 April 1964 yang menjadi titik puncak hubungan Indonesia dengan Korea Utara karena pada tahun tersebut kedua negara sudah saling mendukung satu sama lain dan satu pandangan (Koh, 1977). Berada dalam hubungan diplomatik adalah kondisi normal seperti halnya antar negara yang saling mengakui, dan kedutaan besar yang diakui secara resmi adalah sarana normal untuk melakukan diplomasi bilateral antara dua negara (Berridge, 2010).

Salah satu faktor yang memperkuat kedekatan hubungan diplomasi Indonesia dan Korea Utara adalah persahabatan antara kedua pemimpin negara, yaitu Presiden Sukarno dan Presiden Kim Il Sung. Terdapat beberapa kesamaan antara Sukarno dan Kim Il Sung, mulai dari momen kelahiran mereka berdua yang diyakini sebagai waktu yang berkah menurut kepercayaan lokal masing-masing. Kemudian mereka berdua tumbuh besar dalam kondisi yang dekat dengan situasi masyarakat sekitar di tengah kolonialisme asing, yang membuat mereka berdua sama-sama peka akan isu-isu sosial. Kepekaan ini membuat keduanya mampu memahami permasalahan yang dialami langsung dan membentuk motivasi berpolitik demi kesejahteraan bersama. Sukarno dan Kim Il Sung juga memiliki pandangan serupa tentang bahasa nasional masing-masing sebagai bahasa persatuan. Hal yang sama lainnya adalah bahwa mereka berdua juga sama-sama pernah

dipenjara semasa memperjuangkan nilai-nilai yang mereka percaya (Sukarnoputri, 2012).

Ada pun Prinsip *Juche* ala Kim Il Sung telah menginspirasi Sukarno untuk menciptakan prinsip Ekonomi Berdikari di Indonesia. Ideologi *Juche* ini merupakan gagasan tentang kepercayaan dan kemandirian negara terhadap dirinya sendiri atau serupa dengan istilah “negara yang berdiri di atas kakinya sendiri” (Tan, 1996).

Selain prinsip Ekonomi Berdikari, Presiden Sukarno juga yang pertama kali mempopulerkan dan memperkenalkan konsep Nefos dan Oldefos pada KTT Non Blok. Nefos merupakan istilah dari kekuatan-kekuatan baru yang sedang tumbuh (*New Emerging Forces*), kekuatan-kekuatan kemerdekaan dan keadilan, sedangkan Oldefos merupakan istilah dari kekuatan-kekuatan yang sudah mapan (*Old Established Forces*), kekuatan yang bersifat menguasai. Sukarno menyatakan bahwa Oldefos selalu mengancam keamanan dunia, karena negara Oldefos selalu ingin menguasai negara Nefos. Konsep Nefos dan Oldefos ini kemudian dapat dilihat implementasi nyatanya dari peristiwa GANEFO (*Games of the New Emerging Forces*), sebuah turnamen olahraga yang dicetuskan oleh Sukarno. Turnamen GANEFO turut mempererat hubungan Sukarno dengan Kim Il Sung, baik secara diplomasi negara Indonesia-Korea Utara maupun secara pribadi (Sukarnoputri, 2012).

Faktor lainnya yang kemudian memperkuat hubungan antara Sukarno dan Kim Il Sung ini adalah peristiwa Konfrontasi Malaysia. Rencana pembentukan Federasi Malaysia tidak disukai Sukarno, karena menurutnya itu adalah upaya Inggris menguasai Asia Tenggara. Ketika Malaysia menjadi anggota Dewan Keamanan PBB, Sukarno merespon secara tegas dengan mendeklarasikan bahwa Indonesia resmi keluar dari PBB pada 20 Januari 1965 sebagai wujud nyata melawan upaya neo-kolonialisme dan imperialisme. Tindakan Sukarno ini membuat Kim Il Sung kagum akan ketegasan dan keberaniannya, khususnya dalam menjalankan politik luar negeri Indonesia (Koh, 1977).

Kedekatan kedua pemimpin negara ini kemudian memuncak ketika keduanya saling bertukar kunjungan. Presiden Sukarno berkunjung ke Korea Utara pada tanggal 1 hingga 4 November 1964, beliau mendapat sambutan meriah dari Korea Utara dan disambut secara personal oleh Pemimpin Korea Utara, Presiden Kim Il Sung di bandara. Presiden Kim Il Sung juga kemudian menyatakan simpatinya terhadap perjuangan rakyat Indonesia, yang dapat dilihat pada pidato penyambutan Sukarno di Pyongyang tanggal 1 November 1964 berikut.

“The Korean people fully support the just struggle of the Indonesian people and are sincerely rejoiced over all the successes the Indonesian people are achieving in the struggle. I believe that the current visit of President Sukarno to our country will be a historic contribution to the strengthening of friendship and solidarity of the peoples of Korea and Indonesia,” (Sukarnoputri, 2012)

Selama mengunjungi Pyongyang, Presiden Sukarno begitu terpesona oleh kemandirian Korea Utara dalam hal ekonomi, sesuai prinsip *Juche* yang dipopulerkan oleh Presiden Kim Il Sung. Sukarno juga terpukau kepada produksi kertas yang sudah bersifat swasembada di Korea Utara. Terdapat pula pemberian titel kehormatan doktor honoris causa dalam ilmu politik dari Pyongyang University kepada Presiden Sukarno. Hal yang unik kemudian, adalah bahwa Sukarno juga mulai mempopulerkan sebutan ala Indonesia yakni “Bung Karno”. Hal ini dimulai ketika rakyat Korea Utara menyerukan seruan berupa “Welcome, President Sukarno”. Sukarno merasa panggilan “President Sukarno” terlampau formal, kemudian beliau meminta agar dipanggil dengan sebutan “Bung Karno” saja. Presiden Kim Il Sung kemudian mengiyakan dan menyambut positif usulan Sukarno, dengan mengatakan bahwa ia juga boleh dipanggil dengan sebutan “Bung Kim Il Sung” (Sukarnoputri, 2012). Hal unik lainnya adalah lagu *Song of Bung Karno*, yang dipersembahkan oleh masyarakat Korea Utara kepada Sukarno, seperti di lirik lagu berikut

Song of Bung Karno

Who has Sukarno

Who has Sukarno

It's the Republic of Indonesia

Leader of Indonesian People Sukarno

Indonesian people's Sukarno

Sukarno is always among the people!

Kunjungan Sukarno ini kemudian dibalas oleh Kim Il Sung, yang bertandang ke Indonesia setahun setelahnya, tepatnya pada tanggal 11-15 April 1965. Tentu kedatangan Presiden Kim Il Sung ini disambut secara personal oleh Presiden Sukarno dengan hangat di Bandara Kemayoran. Selama kunjungannya, Presiden Kim Il Sung mengunjungi beberapa kota dan tempat wisata di Indonesia, yakni Jakarta, Kebun Raya Bogor, Kebun Raya Cipanas, dan Bandung. Perjalanan ini merupakan sebuah pencapaian baru dalam sejarah dinamika politik luar negeri Korea Utara saat itu, karena pertama kalinya Presiden Kim Il Sung melakukan perjalanan jauh ke negara yang bukan sepenuhnya berpaham komunis (Koh, 1977).

Salah satu penghormatan kepada Kim Il Sung adalah pemberian titel kehormatan *honoris causa* dalam bidang teknik oleh Universitas Indonesia. Pada mulanya, Rektor UI saat itu, Prof. Dr. Soemantri Brodjonegoro hendak memberikan gelar kehormatan *honoris causa* dalam bidang ilmu sosial (Yunus, 2007). Akan tetapi, usulan ini ditolak oleh Presiden Sukarno. Sukarno menganggap bahwa Kim Il Sung lebih cocok untuk diberikan gelar dalam bidang teknik, karena melihat pesatnya perkembangan industri pembuatan mesin di Korea Utara saat itu (Maulana, 2023).

Ketua pelaksana upacara pemberian doktor *honoris causa* Kim Il Sung adalah Prof. Slamet Iman Santoso, Guru Besar Psikologi UI. Prof. Slamet sudah mempersiapkan segala sesuatunya dengan cermat, termasuk menjalin komunikasi yang intens dengan pihak Istana dan pasukan Cakra Birawa. Mulanya, upacara

akan dilakukan di UI Salemba. Namun dalam hitungan waktu beberapa jam sebelum acara, terjadi perpindahan lokasi secara mendadak ke Istana Negara. Meskipun kaget, Prof Slamet pun langsung sigap mengerahkan semua karyawan untuk memindahkan segala persiapan upacara ke Istana Negara. Untungnya, upacara pemberian gelar *Honoris Causa* Kim Il Sung kemudian berjalan dengan lancar pada tanggal 15 April 1965. Terdapat satu peristiwa unik, yakni dimana Prof Slamet secara tidak sengaja membuat Kim Il Sung berputar dua kali pada saat pengalungan gelar doktor (Santoso, 1992).

Di hadapan berbagai pejabat negara dan civitas akademika Universitas Indonesia, Kim Il Sung menyampaikan pidato doktrinya mengenai “Prinsip Kemandirian dalam Perjuangan Revolusioner Maupun dalam Pembangunan Sebuah Negara”. Beberapa hari setelah acara pemberian gelar kehormatan selesai, Istana Negara mengadakan jamuan makan untuk Kim Il Sung dan rombongannya (Maulana, 2023).



Gambar 1. Presiden RI, Sukarno dan Presiden Korea Utara, Kim Il Sung dalam upacara penyematan gelar kehormatan untuk Kim Il Sung yang dihadiri juga oleh Menteri Perguruan Tinggi dan Ilmu Pengetahuan Indonesia, Brigjen TNI Dr Syarif Thayeb

Sumber : Arsip Universitas Indonesia



Gambar 2. Presiden Sukarno dan Kim Il Sung, Berjalan Bersama Setelah Upacara Penyerahan Gelar Doktor Kehormatan di Istana Negara.

Sumber : Arsip Universitas Indonesia

Kunjungan Kim Il Sung ke Indonesia ini menjadi titik tertingginya hubungan Indonesia-Korea Utara dalam rangka kunjungan balasan pada November 1964 dan sekaligus juga merayakan dasawarsa KAA yang pertama. Sukarno bahkan secara gamblang menyebut Kim Il Sung sebagai 'kawan seperjuangan' dalam melawan Nekolim.

Sebuah peristiwa hangat juga terjadi ketika Kim Il Sung mengunjungi Kebun Raya Bogor. Kim Il Sung terpesona dengan salah satu koleksi bunga anggrek di Kebun Raya Bogor, yakni anggrek berwarna ungu hasil persilangan *species Dendrobium Ale Ale Kai* dan *Dendrobium Lady Constance*. Melihat ketertarikan Kim Il Sung, kemudian Sukarno memberikan nama kepada varietas bunga yakni nama *Kimilsungia*. Nama *Kimilsungia* tersebut merupakan perpaduan antara nama Kim Il Sung dan Indonesia. Bunga ini sekaligus menjadi hadiah ulang tahun Sukarno kepada Kim Il Sung, yakni pada tanggal 15 April. Pada perkembangannya kemudian, varietas bunga *Kimilsungia* diberdayakan di Korea Utara, dan menjadi bunga nasional negara tersebut (Sukarnoputri, 2012). Bunga *Kimilsungia* adalah lambang persahabatan antara bangsa Indonesia dan Korea Utara yang sampai saat ini masih terpelihara dengan baik. Bagi rakyat Korea Utara, Indonesia adalah negara sahabat dekat. Indonesia dipandang sebagai

bangsa yang terhormat. Setiap tanggal 15 April, diadakan Festival Bunga *Kimilsungia* di Korea Utara dan Indonesia selalu jadi tamu kehormatan hingga kini (KBRI Pyongyang, 2019).

Dalam kunjungannya ke Indonesia, Kim Il Sung juga berkesempatan untuk berpidato di Akademi Aliarcham. Beliau memaparkan kesuksesan Korea Utara dan ideologi Juche pada khalayak civitas akademika yang kemudian dibukukan yang berjudul "On Socialist Construction in the Democratic People's Republic of Korea and The South Korean Revolution" dalam *Kim Il Sung Works* oleh Pemerintahan Korea Utara.

Persahabatan kedua pemimpin dan negara terlihat pada *Joint-Statement* (pernyataan bersama) pada 15 April 1965. (Amrullah, 2021). Dalam pernyataan bersama tersebut, Sukarno dan Kim Il Sung menekankan beberapa poin terkait sikap Indonesia dan Korea Utara dalam melihat peristiwa internasional pada saat itu :

1. KAA Kedua di Aljazair menjadi langkah penting untuk mengkonsolidasi front anti-imperialis dan dilaksanakannya CONEFO sesegera mungkin.
2. Meningkatkan perlawanan terhadap imperialisme.
3. Imperialisme harus dihapuskan oleh Front Bersatu Nefos.
4. Masalah Perang Vietnam harus diselesaikan dengan cara mereka sendiri.
5. Dukungan penuh reunifikasi Korea.
6. Dukungan penuh "Konfrontasi" di Malaysia.
7. PBB hanya dijadikan sebagai alat imperialis.
8. Meningkatkan kerjasama Indonesia-Korea Utara.

Sayangnya, kedekatan antara Sukarno dan Kim Il Sung ini tidak bisa bertahan lama. Pada tahun yang sama dengan kunjungan Kim Il Sung ke Indonesia, terjadi tragedi Gerakan 30 September. Peristiwa ini merupakan sebuah tragedi berdarah yang menewaskan tujuh perwira Angkatan Darat. Akibat peristiwa tersebut, Indonesia langsung mengalihkan

fokusnya dari sebelumnya berfokus pada 'Konfrontasi' dan mempromosikan Nefos, menjadi mengatasi G30S secara penuh. Situasi Indonesia saat itu sangat kacau karena yang diculik merupakan perwira tinggi TNI sehingga terjadi kekosongan pemimpin. Pada akhirnya, kendali TNI dipegang oleh Soeharto yang pada saat itu berpangkat Mayjen Kostrad dan memimpin langsung penumpasan 'dalang' G30S. PKI dianggap bersalah dalam tragedi tersebut yang pada akhirnya PKI termasuk organisasi sayapnya ditumpas habis-habisan. Di sisi lain, Sukarno secara perlahan kehilangan kendali pemerintahan, dan puncaknya ketika Sukarno menandatangani Supersemar atau Surat Perintah Sebelas Maret pada tahun 1966 di Istana Bogor yang memberi mandat kepada Soeharto untuk pengamanan keadaan. Melalui TAP MPRS No XXXIII/1967 kekuasaan Sukarno secara resmi dicabut dan Soeharto secara resmi diangkat menjadi pejabat presiden hingga pelantikan resminya sebagai presiden pada 12 Maret 1967 (Amrullah, 2021).

Di bawah pemerintahan Soeharto, Indonesia secara diam-diam bergerak lebih dekat dengan Amerika Serikat dan Korea Selatan, meskipun Jakarta masih menjadi tuan rumah bagi markas besar Gerakan Non-Blok. Meskipun demikian, Indonesia tidak pernah secara resmi memutuskan hubungan dengan Korea Utara. Hubungan diplomatik Indonesia dengan Korea Utara ditegaskan kembali di bawah Presiden Megawati Sukarnoputri, putri Sukarno yang mengunjungi Pyongyang pada tahun 2002 untuk membangun hubungan dengan pemimpin Korea Utara saat itu, Kim Jong Il dengan semangat persahabatan yang dinikmati oleh ayah mereka. Pada tahun 2005, Megawati Sukarnoputri juga mengunjungi Pyongyang sebagai pemimpin Partai Demokrasi Indonesia-Perjuangan (Manurung, 2020).

KESIMPULAN

Dalam aspek politik luar negeri, periode Demokrasi Terpimpin banyak diwarnai

peristiwa-peristiwa internasional yang cukup membawa perubahan dalam kehidupan masyarakat dan politiknya. Salah satu negara yang mempunyai hubungan erat dengan Indonesia saat era Demokrasi Terpimpin adalah Korea Utara, yang tidak bisa dilepaskan dari dekatnya hubungan persahabatan antara Sukarno dan Kim Il Sung selaku pemimpin kedua negara. Persahabatan ini tentu dilatarbelakangi ideologi, kebutuhan mencari sekutu, kepentingan dan perasaan saling sepenanggungan antar dua negara. Kedua tokoh ini juga sama-sama saling terinspirasi, baik ketika Sukarno terinspirasi untuk membuat prinsip Ekonomi Berdikari dari ideologi Juche Kim Il Sung, maupun ketika Kim Il Sung terinspirasi oleh sikap tegas Sukarno yang keluar dari PBB sebagai respon atas penunjukan Malaysia sebagai Dewan Keamanan PBB.

Hubungan diplomasi Indonesia dan Korea Utara kemudian juga dapat berkembang secara cepat dikarenakan kesamaan kepentingan sekaligus kesamaan pola pandang dalam membangun negara dan dunia internasional. Indonesia menginginkan dukungan dalam 'Konfrontasi', dan Korea Utara membutuhkan dukungan dalam 'Reunifikasi'. Ini semua sejalan dengan prinsip Demokrasi Terpimpin Sukarno.

Persahabatan antara Sukarno dan Kim Il Sung kemudian mencapai titik puncaknya ketika kedua tokoh ini saling bertukar kunjungan ke negara masing-masing. Keduanya juga sama-sama terpesona dengan kondisi negara yang lainnya. Hubungan ini juga kemudian tidak hanya di tahap profesional juga melainkan di tahap personal, yakni ketika Sukarno menghadiahkan sebuah varietas bunga anggrek dengan nama *Kimilsungia*, yang kemudian juga menjadi bunga nasional Korea Utara hingga saat ini. Setelah peristiwa G30S dan runtuhnya pemerintahan Sukarno, hubungan diplomatik Korea Utara dan Indonesia tetap terjalin, meski tidak semesra pada era Demokrasi Terpimpin di bawah Sukarno.

REFERENSI

- Abidin, N. F. (2020). Dinamika politik, heriofikasi kim il sung, dan ideologi juche di korea utara (1948-2011). *Diakronika*, 20(1), 61-75.
- Amrullah, E. I. (2021). Hubungan diplomasi indonesia-korea utara 1960 -1967. *Skripsi Sejarah Universitas Indonesia*.
- Ariyantoro, S. D., & Liana, C. (2018). Politik luar negeri indonesia pada masa demokrasi terpimpin. *AVATARA, e-Journal Pendidikan Sejarah*, 6(2), pp.160-174.
- Berridge, G. R. (2010). *Diplomacy: theory and practice, 2nd ed.* New York: Palgrave
- Cahyaningtyas, E. (2014). Urgensi single mediator dalam penyelesaian konflik korea:(peluang indonesia sebagai mediator konflik antara korea utara dan korea selatan) (*Doctoral dissertation*, Universitas Gadjah Mada).
- Chheang, V. (2025). Cambodia-DPRK relations: continuity and changes. In *Southeast Asia-North Korea Relations* (pp. 72-81). Routledge.
- Dalimunthe, A., Carensia Gunawan, M., Dhiya Utari, Z., Dinata, M. R., Halim, P., Estherina S. Pakpahan, N., ... & Syahputra, R. A. (2024). In-depth analysis of lupeol: delving into the diverse pharmacological profile. *Frontiers in Pharmacology*, 15, 1461478.
- Er, L. P. (2022). Relations between seoul, asean states and pyongyang. In *Contemporary Korea-Southeast Asian Relations* (pp. 3-11). Routledge.
- Ertanto Rantung, K. (2017). Kebijakan luar negeri amerika serikat terhadap program pengembangan nuklir korea utara pada masa pemerintahan barack obama (*Doctoral dissertation*, Universitas Komputer Indonesia).
- Ford, G. (2022). *Guns, guerillas, and the great leader: north korea and the third world: benjamin r. young.* Stanford University Press, Stanford, California.
- Haggard, M.T. (1965). North korea's international position. *Asian Survey*, 5(8), pp.375-388. <https://doi.org/10.2307/2642410>
- Hall, D. (2023). *Guns, guerillas, and the great leader: north korea and the third world by benjamin r. young.* stanford: stanford university press, 2021. 218 pp. 90 (Cloth). *Journal of East Asian Studies*, 23(2), 357-359.
- Hartanto, A. W. (2024). Strategi diplomasi ekonomi indonesia terhadap korea utara pada tahun 2004-2014 (*Doctoral dissertation*, Universitas Islam Indonesia).
- Hill, D. T. (2022). The fragile bloom of the kimilsungia: indonesian political exiles in north korea. *Indonesia and the Malay World*, 50(147), 139-160.
- Hidayatullah, A. F. (2018). Kajian morfologi anatomi dan agronomi persilangan kedelai (*Glycine max L. Merril*) Indonesia dengan genotipe introduksi Korea Utara serta pemanfaatannya sebagai modul SMA (*Doctoral dissertation*, Universitas Negeri Malang).
- Imanuella, J., & Aryani, M. I. (2020). Upaya gastrodiplomasi indonesia di korea utara. *Jurnal Hubungan Internasional*, 13(2), 235.
- Indrajat, H. (2016). Demokrasi terpimpin: sebuah konsepsi pemikiran Sukarno tentang demorkasi. *Jurnal Sosiologi*, 18(1), pp. 53-62.
- Iriawan, S. (2017). Reformasi aliansi pertahanan amerika serikat-jepang-korea selatan menghadapi ancaman nuklir korea utara. *Jurnal International & Diplomacy Universitas Satya Negara Indonesia*, 3(1), 101-120.
- Kantor Arsip Universitas Indonesia. (2023). *Kakek Kim Jong-Un Lulusan UI? | Memori UI 02.* <https://youtu.be/wfzOuYu7GhA?si=5Uoca1ASJg-0MTZM> Available at : <https://www.youtube.com/watch?v=wfzOuYu7GhA&t=76s>
- KBRI Pyongyang. (2019). *Indonesia raih penghargaan pada festival bunga kimilsungia di pyongyang korea utara.* [Online] Available at : <https://kemlu.go.id/pyongyang/id/news/1073/indonesia->

- raih-penghargaan-pada-festival-bunga-kimilsungia-di-pyongyang-korea-utara
- Koh, B.C. (1977). Southeast Asia in Pyongyang's Foreign Policy. *Asian Perspective*, 1(2), pp.162-182.
- Koleksi Foto Arsip Universitas Indonesia
- Kusno, M. (2014). Bung hatta dan politik bebas aktif indonesia. *Konfrontasi: Jurnal Kultur, Ekonomi dan Perubahan Sosial*, 3(1), pp. 12-25
- Lestari, B. U. S., Karjaya, L. P., & Sood, M. (2021). Analisis perbedaan kebijakan luar negeri korea selatan dibawah kepemimpinan park geun hye dan moon jae in terhadap kepemilikan senjata nuklir korea utara. *Indonesian Journal of Global Discourse*, 3(1), 81-109.
- Manurung, H. (2020). Indonesia-North korea diplomatic relations: effort to pursue national interest and create regional peace. *Politica*, 11(2), pp.223-244.
- Maulana, I. (2023). *UI dan kunjungan presiden korea utara*. [Online]
Available at : <https://arsip.ui.ac.id/blog/ui-dan-kunjungan-presiden-korea-utara>
- Marsingga, P. (2015). Proliferasi nuklir korea utara: penangkalan dan diplomasi kekerasan. *JIPSI-Jurnal Ilmu Politik dan Komunikasi UNIKOM*, 4.
- Mobrand, E., & Kim, H. (2019). Southeast Asia's Roles in Inter-Korean Affairs. *East Asian Policy*, 11(03), 50-58.
- Pangestika, R. A. (2022). Strategic engagement amerika serikat â€œkorea utara terhadap peluncuran misil korea utara tahun 2017-2018. *Syntax Literate; Jurnal Ilmiah Indonesia*, 7(4), 4010-4021.
- Rosyidin, M., Sabrina, A., Hanjani, A. A., & Kusumawardhana, I. (2021). Mengapa negosiasi internasional gagal? menjelaskan kegagalan perundingan denuklirisasi amerika serikat-korea utara 2019. *Andalas Journal of International Studies*, 10(1), 34-50.
- Santoso, S. I. (1992). *Warna warni pengalaman hidup*. UI Press.
- Septian Siboro, L. (2018). Cyber warfare antara amerika serikat dan korea utara dalam kasus film the interview oleh sony pictures entertainment (Doctoral dissertation, Universitas Komputer Indonesia).
- Sukarnoputri, R. (2012). *President Sukarno & president kim il-sung*. Booknesia.
- Sulaiman, Y. (2015). *Not so strange bedfellows: indonesia relationship with north korea*, pp.321-352.
- Sulaiman, Y. (2009). *Organisasi Internasional dan bargaining theory (studi kasus korea utara dan indonesia)*. Sociae Polites, 10(28).
- Radchenko, S., & Schaefer, B. (2017). Red on white': kim il sung, park chung hee, and the failure of korea's reunification, 1971-1973. *Cold War History*, 17(3), 259-277.
- Tan, T.K. (1996). Indonesia's guided economy and its implementation: 1959-1965. *The Australian Quarterly*, 38(2), pp. 9-28.
- Wijayanti, C. F. (2020). Yurisdiksi korea utara dalam mengadili siti aisyah sebagai pelaku pembunuhan kim jong nam ditinjau dari hukum internasional. *Jurnal Education and Development*, 8(2), 181-181.
- Woo, D. (2023). The peaceful origins of north korea's nuclear programme in the cold war period, 1945-1965. *The Historical Journal*, 66(2), 459-479.
- Wurtz, M. (2020). *The impacts of foreign media on perceptions of north korea: a textual analysis of defector testimonies and experiences*. Undergraduate Theses at Bellarmine University
- Yeremia, A. E., & Arif, M. (2022). *Pragmatism, leadership and regime legitimacy*. Contemporary Korea-Southeast Asian Relations: Bilateral and Multilateral.
- Yunus, N. (2007). *Soemantri brodjonegoro : teguh di jalan lurus*. Lembaga Penerbit FE UI